

**PERAN PBB DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN HAM
TERKAIT KONFLIK BERSENJATA LRA (*LORD'S RESISTANCE ARMY*)
DI UGANDA**

Oleh :
M. Radhina Rahman SPW
0801155637
(ucl_blast@yahoo.co.id)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293– Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The objective of this research is finding the role of the United Nations in the elimination of the Lord's Resistance Army in Africa, and to help address the humanitarian crisis that occurred because of the civil conflict caused by the LRA armed forces in Uganda.

The motive of the LRA and the horrid human rights abuse conducted, have led United Nations to engage on several engagements to eliminate the group. In other words, the United Nations has succeed to help address the humanitarian crisis by the help of Office of United Nations High Commissioner for Human Rights and kick the armed forces from Uganda.

Challenges though are still faced, like the complication of the Security Council priorities, Office of United Nations High Commissioner for Human Rights's tasks to help the humanitarian crisis, access towards LRA affected areas, and the limited mandate of the peacekeeping forces.

Key Words: *Role, Conflict, UN, OHCHR, Uganda, LRA, Humanitarian Crisis*

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan suatu kajian politik internasional yang memfokuskan mengenai peran sebuah organisasi internasional dalam membantu menanggulangi situasi perang dan konflik bersenjata. Penelitian ini membahas mengenai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) dalam membantu menanggulangi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Uganda terkait konflik bersenjata oleh *Lord's Resistance Army* (LRA).

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, juga dianugerahi hak-hak istimewa yang paling hakiki yang biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM). HAM telah diakui secara universal oleh orang-orang di seluruh dunia. Pengakuan tersebut dinyatakan dengan adanya Universal Declaration of Human Rights pada Sidang Umum PBB di Paris, pada 10 Desember 1948 yang dijadikan sebagai hari HAM sedunia. Dalam deklarasi universal yang merupakan dasar perlindungan atas HAM sedunia dan terdiri atas 30 pasal tersebut, secara

umum manusia memiliki tiga hak yang melekat pada dirinya yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, dan yang paling penting adalah hak atas rasa aman.

Manusia sebagai individu merupakan bagian dari negara, maka negaralah yang bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya agar mereka tetap bisa mempergunakan hak asasi mereka sebagaimana mestinya. Negara melalui keamanan nasionalnya juga bertanggung jawab atas keamanan warga negaranya, baik karena ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Namun seiring dengan perkembangan hubungan internasional kontemporer yang diwarnai dengan luluhnya batas-batas yuridiksi antar negara atau globalisasi, ancaman-ancaman terhadap keamanan individu menjadi semakin kompleks, tidak hanya berbentuk kekerasan militer tapi juga non-militer seperti ketidakamanan ekonomi, degradasi lingkungan, terorisme dan lain sebagainya.

Hal tersebut membawa pada adanya perubahan tanggung jawab keamanan (*changing responsibility of security*) oleh negara dan konsep keamanan baru yang merupakan agenda pokok semua insan manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama erat antar semua individu baik dalam cakupan lokal, nasional maupun global. Dengan kata lain, tercapainya keamanan tidak lagi hanya bergantung pada negara melainkan akan ditentukan pula oleh kerjasama internasional secara multilateral yang turut melibatkan aktor non-negara.

Konflik yang terjadi dalam sebuah negara merupakan hal yang lazim terjadi jika berbicara era modern dewasa ini. Berbagai perbedaan dan pertikaian antara sebuah kelompok atau beberapa kelompok, tidak jarang mengalami eskalasi dan harus diselesaikan dengan cara kekerasan seperti perang. *Internal Conflict* (konflik internal) seperti ini tentu memiliki metode tersendiri dalam penyelesaiannya. Begitu pula dengan konflik-konflik lainnya seperti konflik

internasional yang terjadi antara dua negara atau lebih. Konflik internal sebuah negara adalah salah satu kasus yang sering terjadi bahkan di era modern seperti saat ini.

Kasus pemberontakan dalam sebuah negara terhadap sebuah pemerintahan merupakan kasus yang kerap terjadi di negara-negara Afrika. Afrika sebagai sebuah benua yang dianggap paling tertinggal dalam konteks perkembangan di masa kini, masih dihadapkan dengan penyelesaian konflik melalui kekerasan yang tidak jarang menghasilkan melayangnya nyawa rakyat yang menjadi korban dari konflik itu sendiri.

Uganda merupakan salah satu negara di benua Afrika yang memiliki konflik yang tidak berkesudahan. Kebanyakan dari konflik-konflik tersebut telah berlangsung selama waktu yang tidak singkat, termasuk sebuah konflik yang bermula di Uganda Utara, disebabkan oleh kelompok yang disebut sebagai *Lord's Resistance Army* (Tentara Pertahanan Tuhan) yang disingkat LRA. Kelompok *Lord's Resistance Army* merupakan sebuah kelompok militan yang hingga kini belum juga mendapatkan cukup perhatian internasional.

Tahun 1987 menjadi awal munculnya kelompok *Lord's Resistance Army*. Kompetisi yang terjadi antara berbagai kelompok etnis yang ada di Uganda, menginspirasi seorang Joseph Kony untuk membawa keadilan kembali di Uganda melalui kekuatan yang menurutnya diberikan langsung oleh Tuhan. Kony menyebut dirinya seorang nabi, yang telah mendapat wahyu dan diberi kewajiban untuk membawa restorasi politik dan perdamaian di Uganda melalui kekerasan, yang kala itu di Uganda, dihadapkan dengan banyak masalah.

Salah satu cara mengatasi kelompok pemberontakan adalah mengetahui motif dari kelompok tersebut, yang ingin mereka perjuangkan hingga mati. Pemahaman akan motif dari kelompok pemberontak, akan membawa berbagai aktor untuk mengatasi pemberontak tersebut dengan cara mediasi konflik, yang berusaha menyatukan kepentingan

dari aktor pemberontak, dan aktor-aktor berkepentingan lainnya. LRA mampu bertahan hingga sekarang sebab keunikan motif yang dimilikinya, yang dapat dikategorisasikan menjadi 2 bagian, yaitu motif internal dan eksternal. Motif inilah yang membuat LRA mampu bertahan hingga sekarang.

Motif internal menjadi motif yang paling mengerikan dalam LRA ini. Seringkali kelompok LRA melakukan kekerasan dan pembunuhan massal di desa-desa terpencil yang terletak di empat negara korban LRA, salah satunya adalah Uganda. Kenyataan bahwa mayoritas kekuatan LRA merupakan hasil dari penculikan, maka LRA menggunakan sebuah mekanisme doktrinasi melalui ketakutan, guna membangun yang namanya kesetiaan dalam kelompok LRA ini.

Seringkali ditemui bahwa kelompok LRA juga melakukan kekerasan terhadap anggotanya sendiri. Motif dibalik tindakan tersebut juga merupakan motif internal yang bertujuan membangun sebuah rasa takut. Akan tetapi, tujuan kekerasan dalam internal LRA adalah memberikan contoh kepada seluruh anggota LRA, bahwa siapapun yang ingin melakukan pemberontakan terhadap kelompok LRA, akan mendapatkan hal yang sama dengan apa yang dialami anggota LRA yang disiksa ini. Banyaknya anggota LRA yang merupakan *child soldier* (tentara anak-anak), maka mekanisme menakuti yang diterapkan LRA sangat mempan dalam membangun ketakutan, sekaligus loyalitas dalam diri anggota LRA itu sendiri.

Upaya pemberantasan kelompok pemberontak ini, dan penyelesaian kasus yang disebabkan oleh kelompok ini, tidak begitu signifikan. Bahkan usaha dari berbagai aktor dalam penyelesaian kasus LRA ini di tingkatan internasional, misalnya oleh organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi yang sejak berdiri di tahun 1945, menjadi harapan dunia internasional agar terdapat penyelesaian konflik yang damai. PBB telah berusaha melakukan berbagai mekanisme

yang dianggap mampu mengurangi kekuatan dari Lord's Resistance Army itu sendiri. Perpanjangan dan penambahan mandat yang diberikan kepada MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) yang merupakan sebuah misi pasukan perdamaian PBB dalam mengatasi perang sipil di Congo adalah salah satu pendekatan militer yang telah dilakukan PBB. Meskipun misi yang dilakukan adalah di negara Kongo, namun dalam operasionalnya misi ini juga melakukan misi hingga ke negara-negara tetangga termasuk Uganda.

Pelanggaran HAM secara besar yang dilakukan kelompok ini yang akhirnya membedakan Lord's Resistance Army dengan kelompok-kelompok militan dan pemberontak lainnya yang bertahan hingga kini. Pemeriksaan, pembunuhan, dan yang paling parah adalah pemaksaan anak-anak untuk menjadi bagian dari *Lord's Resistance Army* merupakan beberapa pelanggaran HAM yang hingga kini terus dilakukan oleh kelompok LRA. Ideologi yang diterapkan oleh *Lord's Resistance Army* sangat unik, dan dapat dikaji dari segi historis, dan lebih spesifik melalui pemahaman akan masalah politik di Uganda. Kerumitan banyak terjadi dalam menganalisa kelompok *Lord's Resistance Army* ini sebab LRA di satu sisi dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok separatis, dan bahkan kelompok teroris modern.

Dampak dari *Lord's Resistance Army* kini tidak hanya dirasakan di Uganda, namun telah menyebar ke tiga negara tetangga dari Uganda, sehingga membuat masalah lebih rumit, serta kemungkinan lebih banyak rakyat yang menjadi korban juga semakin meningkat.

Penelitian ini akan secara khusus difokuskan pada beberapa hal. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang berbagai kontribusi yang diberikan PBB dalam menanggulangi permasalahan HAM akibat kekerasan dan konflik yang dilakukan kelompok *Lord's Resistance Army* dalam bentuk apapun. Penelitian ini juga

akan menganalisa kendala yang dihadapi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan perannya membantu penanggulangan permasalahan HAM di Uganda akibat konflik tersebut dari tahun 2008 hingga 2011, mengingat berbagai dinamika yang terjadi antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok LRA tersebut.

Teori Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut Cheever dan Haviland adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik melalui peretemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. Terdapat dua macam organisasi internasional secara umum, yakni IGO (*Intergovernmental Organization*) dan INGO (*International Nongovernmental Organization*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.

PBB merupakan organisasi internasional terbesar saat ini, dan melalui Dewan Keamanan PBB, PBB ini diharapkan mampu membawa perdamaian di tempat-tempat berkonflik yang ada di dunia. Kasus Lord's Resistance Army yang terjadi di Uganda tahun 1980an merupakan salah satu tanggung jawab dari PBB, mengingat adanya ketidakmampuan pemerintahan Uganda dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah jelas merupakan sebuah organisasi internasional. Untuk meneliti masalah diatas maka perlu di pahami terlebih dahulu definisi dan fungsi dari organisasi internasional. Definisi Organisasi Internasional menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. adalah Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara

negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi timbal-balik yang diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Studi Kualitatif ini konsisten dengan *Qualitative Paradigm*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Pemilihan studi dokumentasi sebagai data primer dilakukan oleh beberapa alasan mendasar seperti keterbatasan waktu, daerah penelitian, serta permasalahan biaya. May mengatakan bahwa studi dokumentasi dapat memberi kita banyak hal tentang bagaimana kejadian terjadi atau diciptakan pada waktu tertentu, alasan di balik suatu peristiwa, dan menyediakan materi yang dapat menjadi basis untuk investigasi lebih lanjut.² Pengumpulan data mengenai peran PBB dalam menangani permasalahan HAM di Uganda tersebut difokuskan pada studi kepustakaan, dokumentasi, tinjauan historis, media massa, situs internet, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan studi kasus yang diteliti. Adapun kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data pemilihan referensi dari tulisan maupun buku-buku yang ada

¹ Lexy J. Meleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 6.

² Lisa Harison, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.143

hubungannya dengan komunikasi serta bahan-bahan lainnya untuk memperoleh teori maupun data. Terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yang telah didokumentasikan ke dalam beberapa literatur.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Kelompok pemberontak *Lord's Resistance Army* (LRA) dibentuk karena sebuah perpecahan dan konflik antar etnis yang terjadi di Uganda. Dasar konflik yang terjadi di Uganda disebabkan karena adanya perebutan kekuatan di pemerintahan dan di militer. Keadaan ini awalnya muncul ketika masih masa kolonialisasi, namun kembali diterapkan pasca kemerdekaan Uganda pada tanggal 9 Oktober 1962.

Terjadinya perpecahan diantara Utara dan Selatan Uganda terjadi ketika Inggris melakukan rekrut militer terhadap warga Utara dan Selatan Uganda. Meskipun begitu, Inggris melakukan konsentrasi pengembangan ekonomi Uganda dan pengenalan industri, serta sistem pertanian di wilayah Uganda Selatan (kelompok etnis Baganda).

Kebijakan tersebut membentuk sebuah tantangan besar dalam pembentukan negara yang bisa menyatu satu sama lainnya. Para kelompok etnis yang berada di Uganda Utara (Acholi dan West Nile) dikatakan oleh kaum Inggris, bahwa mereka adalah prajurit. Kemerdekaan di tahun 1962 tidak membawa perdamaian di Uganda, karena sejak itu, terus bermunculan pemimpin diktator yang bahkan telah melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya sendiri. Rezim diktator Idi Amin (1971-1979) bertanggung jawab atas kematian oposisi yang berjumlah 300.000 orang. Konflik perebutan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim diktator Milton Obote (1980-1985) berjumlah 100.000 orang.³

³ Conciliation Resources, *When Will This End and What Will it take? People's Perspectives on Addressing the Lord's Resistance Army Conflict*, November 2011, hal. 5

Pemerintahan Yoweri Museveni kemudian dimulai pada tahun 1986, melalui kudeta terhadap presiden Uganda waktu itu, yaitu Tito Okolle. Sebuah kelompok pemberontak yang bernama *National Resistance Army* (NRA) dibawah perintah Yoweri Museveni berhasil menguasai beberapa wilayah Uganda, termasuk wilayah penduduk Acholi. NRA banyak melakukan pelanggaran HAM kepada warga Uganda Utara, yang menyebabkan muncul beberapa gerakan pemberontakan, melawan pemerintahan Museveni. Salah satu diantaranya adalah *Uganda People's Democratic Army* (UPDA). Pada tahun yang sama, muncul kelompok pemberontak lain yang dikenal sebagai *Holy Spirit Movement* yang didirikan oleh Alice Lakwena.⁴ Alice Lakwena merupakan seseorang yang memulai gerakan perlawanan terhadap Museveni, dan mengatakan dirinya adalah seorang nabi yang terus mendapatkan pesan dari tuhan untuk melakukan perlawanan.

Gerakan pemberontakan yang dilakukan Alice Lakwena kemudian menginspirasi Joseph Kony. Joseph Kony kemudian banyak melakukan ceramah dengan mengatakan dirinya juga adalah seorang nabi yang diberikan ilham dan tugas untuk melindungi dan mempertahankan hak kaum Acholi. Joseph Kony kemudian membentuk kelompok *Lord's Resistance Army* pada tanggal 1 April 1987, dan keluar dari desa Odek untuk melakukan perlawanan di wilayah-wilayah luar. Joseph Kony bertemu dengan beberapa anggota sisa dari kelompok pemberontak melawan Idi Amin di tahun 1970an, yaitu *Uganda National Liberation Front* dan merekrut anggota sisa dari kelompok pemberontak tersebut.⁵

Lord's Resistance Army dan kelompok *Holy Spirit Movement* bergerak untuk tujuan yang

⁴ Adam Branch, *Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda*, Oxford University Press Inc., New York, 2011, hal 56.

⁵ Andre Le Sage, *Countering the Lord's Resistance Army in Central Africa*, Institute for National Strategic Studies SF No. 270, 2011, hal. 3.

sama, namun di wilayah yang berbeda. *Holy Spirit Movement* dikalahkan di distrik Jinja pada tahun 1988, dan Lakwena kabur menuju Kenya. Kony melihat kesempatan tersebut untuk merekrut para anggota sisa *Holy Spirit Movement* dan juga sisa dari kelompok pemberontak *Uganda People's Democratic Army* (UPDA). Pemimpin UPDA yaitu Odong Latek meyakinkan Kony untuk menggunakan taktik conventional guerilla warfare, terutama taktik serangan mendadak di desa-desa.⁶ Sejak saat itu, LRA terus berkembang dan tidak berhenti dalam menyebar rasa takut terhadap masyarakat yang ada di Uganda, bahkan hingga ke negara-negara tetangga.

Pelanggaran *Lord's Resistance Army*

Kelompok LRA merupakan salah satu kelompok pemberontak yang unik jika berbicara masalah agenda, tujuan dan motif dari pemberontakannya. Sama seperti kelompok pemberontak lainnya, *Lord's Resistance Army* juga memiliki motif dari semua tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini dilakukan. Motif tersebut dapat dibagi menjadi 2 motif utama, yaitu motif spiritual, dan motif politis. Dari segi motif spiritual, Joseph Kony merupakan seorang anak dari orang tua yang memiliki reputasi mistis yang tinggi di masyarakat. Kony sejak pembentukan LRA, merasa dirinya sedang memenuhi kewajiban spiritual sebagai seorang *messenger of god* (nabi). Kony selalu merasa bahwa dia diutus oleh tuhan, untuk menyelamatkan dan melindungi kaum Acholi.

Tindakan awal dari Joseph Kony membuktikan kepercayaan spiritual yang dimiliki oleh Kony. Kony berusaha mendapatkan dukungan dari populasi Uganda Utara pada November 1987, sebagai upaya menghukum pasukan militer pemerintahan yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum

Utara Uganda.⁷ Pada akhirnya, Kony membentuk sebuah kesatuan dari berbagai kelompok pemberontak yang ada di Uganda Utara, menjadi satu kelompok. Meskipun begitu, dasar utama kepercayaan spiritual dari Kony adalah masalah sosial-politik kaum Acholi waktu itu.

Interpretasi Kony kemudian berubah menjadi sangat destruktif. Akhir 1980an, LRA melakukan konsentrasi serangan terhadap para angkatan militer pemerintahan. Namun sejak tahun 1992, LRA mulai melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Tindakan ini dibuktikan dengan sebuah pernyataan yang Kony berikan terhadap anggotanya, tentang sebuah ilham yang baru saja ia dapatkan. Kony mengatakan bahwa LRA diberikan kewajiban untuk menghukum semua orang yang menolak permintaannya menjadi anggota LRA, dan anak-anak dari mereka harus diculik, dan dibakar hingga mati. Pernyataan di tahun 1992 tersebut diperlihatkan oleh beberapa kasus penyerbuan LRA di tahun yang sama. Anggota LRA membakar rumah warga, menculik anak, dan menggunakan *machetes* (parang) untuk menghukum (dalam artian membunuh) warga tersebut. Kenyataan ini juga sebagai bentuk balas dendam terhadap warga yang mendukung pemerintah, dan menerapkan sistem pertahanan diri dengan menggunakan panah yang diberikan oleh pemerintahan di beberapa desa, di tahun 1991-1992.⁸

Terlepas dari agenda atau motif LRA, perlu juga dipahami beberapa taktik operasi yang selama ini digunakan oleh LRA. Taktik tersebut dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu taktik pasukan anak-anak dan taktik operasi militer. Taktik pasukan militer anak-anak merupakan salah satu ciri khas dari LRA, yang digunakan Kony karena beberapa hal. Pertama adalah kemudahan dalam doktrin, yang mempercepat

⁶ Adam Branch, *Displacing Human Rights; War and Intervention in Northern Uganda*, Oxford University Press Inc., New York, 2011, hal 59.

⁷ International Crisis Group, *Northern Uganda: Understanding and Solving the Conflict*, 14 April 2004, hal. 3.

⁸ *Ibid.*

dan memastikan sebuah perintah akan diikuti. Anak-anak akan mengikuti setiap gerakan yang diajarkan oleh Kony, karena kemudahan doktrinasi tersebut.

Alasan kedua adalah mobilitas LRA yang begitu cepat jika menggunakan tentara anak-anak. Anak-anak berjalan lebih cepat, dan tidak berhenti untuk istirahat dalam jangka waktu yang pendek. Kapasitas untuk mengangkat barang-barang yang dicuri juga semakin meningkat jika menggunakan anak-anak. Jumlah tentara anak-anak yang LRA miliki begitu banyak, sehingga ketidakpuasan terhadap asistensi anak-anak dalam pengangkatan barang kemudian akan dibunuh, dan diganti oleh yang lainnya. LRA tidak menemukan kesulitan apapun dalam mobilitas perpindahan dari tempat ke tempat, karena penggunaan anak sebagai tentara LRA.

Alasan terakhir adalah kemudahan dalam mendoktrin ketakutan. Terdapat beberapa cara yang digunakan LRA dalam membangun ketakutan terhadap tentara anak-anak Kony. Pertama dengan memaksa membunuh komunitas warga yang diserbu oleh LRA waktu itu, dan anak tersebut akan dibunuh jika tidak membunuh warga sipil. Kedua dengan membunuh tentara anak-anak yang ada dalam LRA. Beberapa kali LRA akan melakukan metode kedua untuk membangun ketakutan antar sesama anggota LRA agar tidak melakukan pemberontakan, ataupun lari dari LRA. Kedua metode tersebut membangun rasa takut, dan membuat anak-anak tersebut lebih mudah diperintah dan didoktrin agar tidak melawan nilai-nilai dalam LRA.

Taktik kedua yang digunakan oleh LRA adalah operasi militer. Layaknya kelompok pemberontakan lainnya, LRA menganggap bahwa dengan penggunaan persenjataan dan kekerasan, LRA akan menghadapi kemudahan yang lebih dalam memastikan keinginannya tercapai. LRA meski merupakan kelompok pemberontak, *Lord's Resistance Army* tidak memiliki markas di Uganda Utara, ataupun di salah satu dari 4 negara yang LRA kini masuki.

LRA melakukan penyerangan di desa-desa terpencil dengan membawa 100 sampai 160 pasukan, lalu membagi diri menjadi kelompok yang masing-masing terdiri atas 20 pasukan. Serangan yang dilakukan LRA bertujuan untuk mengambil harta dan segala kebutuhan dari LRA namun agar pencurian tersebut bisa berjalan lancar, maka penyerangan brutal dilakukan untuk menimbulkan trauma dan membuat warga kabur dari rumah mereka. Dalam periode 2008 hingga sekarang, metode militer yang digunakan oleh LRA sering merupakan taktik *hit and run* (tabrak, lalu lari), dimana LRA hanya melakukan penyerangan, lalu kabur dari tempat penyerangan tersebut.⁹

Gagalnya *Juba's talk*

Joseph Kony menyadari kerusakan yang terjadi akibat berbagai operasi militer yang dilakukan Uganda sejak tahun 2002. Kenyataan tersebut membuat Kony mengusulkan gencatan senjata, dan menyatakan bahwa LRA terbuka terhadap proses negosiasi. Operasi militer kemudian dihentikan untuk sementara dengan harapan bahwa konflik dengan LRA akan berakhir dengan cara non-koersif. Meski demikian, Kony memiliki agenda yang berbeda yang tidak sesuai dengan aktor-aktor pemerintah. Kony menggunakan taktik tersebut agar gempuran militer dapat dihentikan untuk sementara, dan waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran terhadap negara-negara tetangga (wilayah perbatasan). Tahun 2006 menjadi tahun LRA melakukan penyebaran secara keseluruhan, dari Uganda menuju negara Republik Demokratik Congo, Republik Afrika Tengah, dan Sudan Selatan. Penyebaran tersebut dilakukan dalam waktu 2 tahun, dimana sedang dilakukan negosiasi yang disebut *Juba Talks* antara pemerintahan Uganda dan perwakilan dari LRA yang bukan merupakan anggota senior LRA karena adanya ketakutan akan ditahan.¹⁰

⁹ *Ibid*, hal. 230.

¹⁰ *Ibid*.

Penyebaran di Sudan Selatan pertama terjadi di tahun 2006, Republik Demokratik Kongo di tahun 2008, dan Republik Afrika Tengah pada Februari 2008.¹¹

Sadar bahwa kapasitas LRA telah menurun drastis akibat serangan operasi militer, Joseph Kony menginisiasi sebuah prosesi perdamaian melalui negosiasi. Negosiasi tersebut dikenal sebagai *Juba Talks*. *Juba Talks* merupakan negosiasi antara kelompok LRA dan pemerintah Uganda, yang dimediasi oleh wakil Presiden Sudan Riek Machar, yang berlangsung dari bulan Juni 2006 di wilayah Sudan Selatan. *Juba Talks* pertama menghasilkan sebuah gencatan senjata di September 2006, dan waktu itu merupakan suatu kemajuan pesat jika dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya yang telah dijalani selama 20 tahun lebih. Beberapa poin menjadi alasan kegagalan dari *Juba Talks* tersebut.¹²

Kegagalan pertama disebabkan oleh adanya perintah penangkapan Joseph Kony oleh ICC (*International Criminal Court*). Selama proses negosiasi berlangsung, negosiasi oleh beberapa pihak menginginkan Kony untuk menyerah, dan menyerahkan diri kepada ICC di waktu yang sama. Akibatnya, Kony merespon dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan yang telah dituduhkan oleh dunia internasional. Ancaman tersebut juga menjadi alasan mengapa Joseph Kony tidak pernah hadir dalam forum negosiasi yang sedang berlangsung, sehingga LRA diwakili oleh perwakilan lainnya yaitu Vincent Otti. Kejadian ini menjadi penghambat utama, sebab ancaman tersebut membawa kemarahan kepada para anggota kelompok LRA, sehingga kepercayaan terhadap prosesi negosiasi menjadi hilang.

¹¹ The LRA in Congo, CAR, and South Sudan. www.enoughproject.org/conflicts/lra/congo-car-south-sudan. Diakses tanggal 20 Januari 2012.

¹² Mareike Schomerus, *The Lord's Resistance Army in Sudan: A History and Overview*, Institute of International Studies HSBA Working Paper 8, 2007, hal. 38.

Kegagalan kedua disebabkan oleh ketidakpercayaan Kony kepada negosiasi tersebut. Beberapa poin selama 2 tahun negosiasi, Museveni (pemerintah Uganda) berusaha memberikan tempat aman agar semua kelompok LRA bisa berkumpul di suatu tempat. Adanya ancaman akan ditangkap atau dibunuh berdasarkan beberapa operasi militer yang dilancarkan tahun-tahun lalu untuk memberantas kelompok LRA membuat Kony enggan untuk menerima tawaran dalam negosiasi tersebut. Meski demikian, kegagalan utama terjadi selama negosiasi karena Uganda terus menjalankan proses pemburuan anggota LRA selama negosiasi 2 tahun tersebut berlangsung. Terlihat jelas pada November 2006 ketika Kony menyatakan melalui perwakilannya, bahwa ia ingin mundur dari *Juba Talks* akibat pembunuhan yang dilakukan militer Uganda terhadap 3 anggota LRA.

Lord's Resistance Army disebutkan sebagai teroris internasional dan masuk dalam kebijakan *counter terrorism*. Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh LRA, tidak dipungkiri bahwa mereka dapat menjadi ancaman bagi dunia internasional dikarenakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh LRA itu sendiri seperti tindakan yang sudah melanggar HAM seperti pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian masal, pembentukan pasukan militer anak, dan pelanggaran HAM lainnya. Penyerangan itu tidak hanya terjadi di Uganda bahkan aktif di 3 negara tetangga Uganda yaitu, Sudan, Kongo, dan Afrika Tengah.

Lord's Resistance Army bertanggung jawab atas lebih dari 100.000 kematian selama konflik yang terjadi Uganda. Jumlah ini terlalu besar untuk sebuah pembunuhan di suatu Negara. Sedangkan jumlah warga yang diperkirakan meninggal akibat konflik dengan kelompok *Lord's Resistance Army* ini di tahun 2008-2011 ditotalkan sebanyak 2.400 orang yang terjadi di kongo, sudan, selatan dan Afrika Tengah.¹³

¹³ Key Statistics, <http://theresolve.org/key-statistics>

Pada tahun 2010, terdapat total 470 kali penyerangan LRA di Congo, Afrika Tengah, dan Sudan Selatan yang mengakibatkan 709 warga meninggal akibat penyerangan tersebut. Pada tahun 2011 terdapat 284 penyerangan dengan 154 warga meninggal. Di tahun 2012 menunjukkan 222 penyerangan, dan 41 warga meninggal.¹⁴ Beberapa kasus penyerangan di tahun 2011 sendiri adalah 34 di Republik Afrika Tengah, 28 di Sudan Selatan, dan 222 penyerangan di Republik Demokratis Congo. Pola memperlihatkan adanya perpindahan wilayah penyerangan yang lebih fokus di wilayah Congo, akan tetapi jumlah penyerangan telah berkurang drastis di tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 di mana jumlah penyerangan mencapai 470.¹⁵

Tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh kelompok militan *Lord's Resistance Army* seperti pembunuhan masal, penculikan, hingga perekrutan rentana anak inilah yang menyebabkan campur tangan PBB sebagai lembaga internasional tertinggi yang mampu menyelesaikan permasalahan di Uganda tersebut agar tidak menimbulkan kersahana dan kepanikan di Negara Afrika lainnya. Bahkan tidak hanya di Afrika, adanya campur tangan PBB tersebut juga dikarenakan permasalahan seperti ini terlalu meresahkan seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Kekerasan, pembunuhan, penculikan, perekrutan tentara anak, hingga doktrin yang merajalela yang dilakukan oleh kelompok *Lord's Resistance Army* tersebut sudah terlalu mewabah dan tidak akan sanggup di atasi oleh pemerintahan Uganda itu sendiri, melainkan harus ada campur tangan dari PBB sebagai lembaga tertinggi internasional

dan bahkan mungkin seluruh dunia membantu adanya pemberantasan kelompok bersenjata ini.

Peran PBB dan OHCHR

Dewan keamanan PBB sebagai badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melaksanakan beberapa hal guna memberantas kelompok *Lords's Resistance Army* ini. Beberapa resolusi yang telah diterapkan dari tahun 2008 hingga 2012 adalah Resolusi 1812 (2008), Resolusi 1991 (tahun 2011) dan Resolusi 1996 (tahun 2011). Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (secara spesifik Dewan Keamanan) telah menggunakan metode *Multidimensional Approach* yang merupakan pendekatan multidimensional dalam menghadapi kelompok LRA, dan disamping itu OHCHR juga mampu memberikan bantuan berupa obat-obatan, tempat tinggal, bahkan mengingatkan kepada seluruh dunia dan khususnya warga Uganda untuk lebih menjunjung tinggi keberadaan HAM.

PBB pun melakukan berbagai mekanisme dalam menangani konflik etnis tersebut. Kelima tujuan strategis di bawah kemudian direalisasikan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, militer, dan mekanisme pendukung yang mana kelima tujuan tersebut adalah:

1. *Strategic goal one: the African Union-led Regional Cooperation Initiative against the Lord's Resistance Army is fully operational and implemented.*
2. *Strategic goal two: efforts to promote the protection of civilians are enhanced*
3. *Strategic goal three: current disarmament, demobilization, repatriation, resettlement and reintegration activities are expanded to cover all LRA-affected areas,*
4. *Strategic goal four: a coordinated humanitarian and child protection response is promoted in all LRA-affected areas,*
5. *Strategic goal five; peacebuilding, human rights, rule of law, and long-term*

¹⁴ Invisible Children dan Resolve LRA Tracker, *LRA Crisis Tracker; Annual Security Brief 2011*. 2011, hal. 5.

¹⁵ United Nations Security Council, *Letter Dated 25 June 2012 from the Secretary-General Addressed to the President of the Security Council*, United Nations: New York, 2012, hal. 13.

development support is provided to LRA-affected governments to enable them to establish authority across their territory.

Kasus yang diakibatkan oleh kelompok bersenjata LRA sungguh meresahkan banyak pihak, tidak hanya di Afrika, bahkan di seluruh dunia. Dampak ketakutan dan rasa prihatin bagi seluruh dunia untuk seluruh masyarakat yang ada di Afrika yang mengalami kontak langsung dengan kelompok bersenjata tersebut, khususnya Uganda yang merupakan Negara asal di mana kelompok bersenjata ini berdiri. Lebih dari itu, kasus ini telah menjadi sorotan langung bagi organisasi internasional terbesar di dunia yaitu PBB untuk mengatasi seluruh konflik yang terjadi di seluruh dunia serta melalui kantor komisariss tertingginya yang bernama OHCHR yang mengatasi permasalahan HAM yang ada baik di Afrika hingga Negara lainnya yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Di kawasan Afrika, OHCHR memiliki kantor yang hampir mencakup seluruh daerah, baik itu bagian tengah Afrika, Timur, Barat, dan Selatan. Di Negara Uganda, OHCHR tersebut memiliki kantor perwakilan dari badan atau komisi PBB ini. Kantor OHCHR telah berdiri sejak tahun 2005 hingga sekarang dengan pegawai atau staff yang dimiliki sebanyak 50 orang. Di Negara Uganda, OHCHR memiliki mandate untuk memulihkan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh kelompok bersenjata *Lord's Resistance Army*, di mana kelompok bersenjata ini telah melakukan pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, merekrut anak – anak untuk menjadi tentara, sehingga moral penduduk yang ada di Negara ini telah disakiti dan harus diperbaiki.

Total estimasi keseluruhan biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan komisi ini untuk Negara Uganda telah mencapai US \$ 2,950,459.¹⁶ Sedangkan pada tahun 2008 estimasi pengeluaran mencapai US \$

3,407,341¹⁷, US \$ 3,222,992¹⁸ pada tahun 2009, dan total US \$ 6,492,400 pada tahun 2010 – 2011.¹⁹ Pengeluaran ini berguna untuk membangun kantor dan melakukan aktifitas – aktifitas yang berkaitan dengan pemulihan HAM di Negara Uganda itu sendiri.

Di Uganda, pelatihan untuk para *staff* Komisi Hak Asasi Manusia dan Sipil-Militer yang mengakibatkan adanya peningkatan *monitoring* akan hak asasi manusia dan penjangkauan serta upaya mediasi di *camp-camp* kelompok bersenjata LRA dan memulihkan daerah - daerah yang sudah terlalu parah kasus HAM nya.

Peran utama dari negara kantor OHCHR adalah untuk melindungi dan memberdayakan orang-orang di daerah yang terkena dampak konflik dari utara dan timur laut Uganda. Mengingat situasi hak asasi manusia dan keamanan secara keseluruhan membaik di negeri ini, pada tahun 2008 Kantor memprioritaskan penguatan kapasitas lokal untuk memantau dan menanggapi konflik dan pasca pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan konflik. Pada akhir tahun, kantor memiliki enam kantor sub-regional/district di Gulu, Pader, Kitgum (Acholiland), Lira (Lango), Soroti (Teso), dan Moroto (Karamoja), di samping kantor pusatnya di Kampala, dan kantor penghubung di Kotido (Karamoja).

Situasi hak asasi manusia dan keamanan di utara dan timur laut Uganda terus membaik selama tahun 2008 dengan 75 persen dari 1,8 juta pengungsi internal yang kembali ke rumah mereka. Proses perdamaian Juba berusia dua tahun itu terhenti pada bulan Desember 2008 dengan operasi militer bersama dengan Uganda, Republik Demokratik Kongo dan Sudan selatan melawan LRA di pangkalan Kongo timur setelah LRA gagal menandatangani perjanjian perdamaian akhir. Di tingkat nasional, penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan buruk terus dilaporkan. Uganda selanjutnya terdaftar

¹⁷ OHCHR annual reports tahun 2008, hal 76

¹⁸ OHCHR annual reports tahun 2009, hal 78

¹⁹ OHCHR annual reports tahun 2011, hal 142

¹⁶ OHCHR in the field of Africa, hal 7

melakukan kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah dasar dan mengatasi penyakit utama, seperti HIV / AIDS dan malaria. Namun, kesenjangan antar daerah menunjukkan bahwa target *Millennium Development Goal* untuk mengurangi angka kematian ibu dan balita pada tahun 2015 tampaknya tidak akan terpenuhi.²⁰

Pada tahun 2008, OHCHR berupaya memulihkan keadaan yang parah dari kasus pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh LRA dengan melatih 2.239 polisi, 950 anggota tentara, 60 anggota dari pemerintah kabupaten setempat, 25 peneliti dari Komisi Hak Asasi Manusia Uganda dan 30 anggota Kerjasama Sipil – Militer Pusat.

Aktifitas lain yang dilakukan oleh badan komisi OHCHR untuk memerangi kejahatan HAM yaitu²¹ :

- a. Memimpin upaya advokasi untuk membangun solusi berkelanjutan. Ini dilakukan untuk mengembalikan moralitas para pengungsi dan melakukan misi bersama ke kamp-kamp dan memulihkan daerah yang memiliki kasus HAM yang parah lalu memberikan saran teknis tentang hak-hak penyandang cacat dan menganjurkan untuk ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- b. Melakukan pertemuan sensitisasi pada reparasi dan hak asasi manusia bagi para pemangku kepentingan. Ini berlaku untuk semua kalangan baik pemerintah, maupun para korban termasuk para pembuat kebijakan lokal dan tokoh adat di Acholiland , Lango dan Teso .
- c. Mengintensifkan dialog dengan Pemerintah untuk kelangsungan pembelajaran pada anak-anak dan konflik bersenjata. Aktifitas ini ditujukan agar pemerintah mau atau aktif untuk

membantu PBB menyampaikan misi pemulihan moral setelah konflik dan memberikan pembelajaran kepada anak – anak akan HAM

- d. Mengutamakan hak dan advokasi gender dalam *Joint Task Force* PBB tentang HIV / AIDS dan mendukung Komisi Reformasi Hukum Uganda dalam penyusunan Pencegahan HIV / AIDS .
- e. Mempromosikan kebiasaan menjaga hak asasi manusia di antara anggota tim negara PBB , termasuk melalui pelatihan untuk 36 agen PBB yang bertugas di Afrika.
- f. Mendukung Program Pembangunan PBB di daerah – daerah dengan melakukan pendekatan berbasis HAM.
- g. Memberikan analisis hak asasi manusia untuk meninjau sepuluh tahun Penanggulangan Kemiskinan Rencana Aksi Uganda , dimaksudkan untuk menginformasikan Rencana Pembangunan Nasional yang baru .
- h. Menyarankan Negara PBB akan elemen hak asasi manusia dan keadilan , hukum serta ketertiban terhadap sektor dan memberikan bimbingan teknis untuk kebijakan *Standing Committee Inter - Agency* .
- i. Melatih lebih dari 90 pejabat pemerintah daerah dalam menerapkan pendekatan akan hak asasi manusia. Ini dilakukan agar pemerintah daerah sadar akan pentingnya HAM.
- j. Pemerintah dan masyarakat sipil melakukan keterlibatan langsung didukung dengan mekanisme HAM PBB, termasuk kewajiban pelaporan terhadap pelanggaran HAM.
- k. Pada tahun 2009 , terdapat intervensi langsung OHCHR dengan pihak berwenang dalam kasus 60 korban pelanggaran hak asasi manusia untuk membawa perbaikan pada kehidupan individu yang bersangkutan dengan pelanggaran yang berkenaan dengan

²⁰ *Op. cit*, hal 76

²¹ *Ibid*, hal 77

standar hak asasi manusia dalam operasi militer.²²

Dengan adanya aktifitas – aktifitas yang dilakukan oleh komisi OHCHR PBB tersebut dapat diambil hasil yang cukup signifikan yaitu adanya kesadaran akan pentingnya HAM tertanam di dalam pikiran masyarakat Uganda untuk lebih menjaga dan memelihara HAM tersebut. Jika terjadi pelanggaran HAM maka akan terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh para penjaga keamanan, baik itu polisi ataupun tentara untuk menindak lanjuti mereka yang melanggar. Selain itu adanya pemulihan yang sangat baik di berbagai daerah di mana kasus HAM terparah dengan adanya monitor langsung dari OHCHR untuk ditindak lanjuti dengan cara mediasi bahkan dengan tindakan keras. Dikarenakan inisiatif OHCHR itu , Satuan Petugas Pemantauan dan Pelaporan Uganda membuat submisi untuk Komite Hak Anak tentang implementasi dari Opsi protocol untuk tentara anak, serta membantu untuk menyelesaikan Rencana Aksi untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata . diantaranya adalah²³ :

- a. Kantor perwakilan ini sejatinya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten daerah di Lira , Kitgum , Gulu dan Pader yang akhirnya terjadi pembentukan badan hak asasi manusia oleh pemerintah daerah di kabupaten tersebut . Badan yang bertugas untuk memantau situasi hak asasi manusia dan untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis HAM ke dalam rencana pembangunan di tingkat kabupaten .
- b. Penelitian tentang keadilan yang dipimpin untuk memahami perbaikan akan hak asasi manusia di antara para pemangku kepentingan utama. Hal ini tercermin dalam kampanye advokasi

berikutnya oleh kelompok masyarakat sipil , Koalisi Transisi Keadilan , di Uganda utara . Kampanye ini menganjurkan bahwa Kelompok Kerja Keadilan Transisi Pemerintah memasukkan sebuah reparasi dalam mandatnya . Sebuah kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk mengatasi kekerasan terhadap wanita yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh LRA.

- c. Badan-badan khusus PBB telah meminta pelatihan staf yang lebih luas pada indikator hak asasi manusia , terutama pada hak atas pangan , kesehatan dan pendidikan.

Di Uganda Utara, pemerintah dan aktor internasional membahas tahap kedua dari proses pemulihan perdamaian setelah konflik, serta proses pembangunan. Isu penting berkaitan dengan pemenuhan hak hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan dan akses terhadap pengembalian lahan dan sisa pengungsi internal atau dikenal juga dengan *internally displaced persons* (IDP) masih menjadi perhatian pemerintah dan terkait dengan masalah besar dalam akses terhadap keadilan dan pelaksanaan yang efektif dari program pemerintah. Selama tahun 2011, Keadilan Hukum dan Ketertiban Sektor dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditransisi untuk merespon hak-hak korban atas reparasi, kebenaran dan keadilan.²⁴ Selain itu, di Uganda Utara, OHCHR memantau situasi hak asasi manusia dan bertindak sebagai penghubung antara para aktor nasional dan sistem hak asasi manusia internasional untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang standar hak asasi manusia internasional, berbagi praktik terbaik tentang promosi dan perlindungan hak asasi manusia, serta memperluas bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada aktor nasional,

²² OHCHR annual reports tahun 2009, hal 80

²³ *Ibid*, hal 77

²⁴ OHCHR annual reports tahun 2011, hal 214

khususnya Komisi Hak Asasi Manusia Uganda (UHRC).

Penutup

Kasus pemberontakan dalam sebuah negara terhadap sebuah pemerintahan merupakan kasus yang kerap terjadi di negara-negara Afrika. Afrika sebagai sebuah benua yang dianggap paling tertinggal dalam konteks perkembangan di masa kini, masih dihadapkan dengan penyelesaian konflik melalui kekerasan yang tidak jarang menghasilkan melayangnya nyawa rakyat yang menjadi korban dari konflik itu sendiri.

Uganda merupakan salah satu negara di benua Afrika yang memiliki konflik yang tidak berkesudahan. Kebanyakan dari konflik-konflik tersebut telah berlangsung selama waktu yang tidak singkat, termasuk sebuah konflik yang bermula di Uganda Utara, disebabkan oleh kelompok yang disebut sebagai *Lord's Resistance Army* (Tentara Pertahanan Tuhan) yang disingkat LRA. Kelompok *Lord's Resistance Army* merupakan sebuah kelompok militan yang hingga kini belum juga mendapatkan cukup perhatian internasional. Tahun 1987 menjadi awal munculnya kelompok *Lord's Resistance Army*. Kompetisi yang terjadi antara berbagai kelompok etnis yang ada di Uganda, menginspirasi seorang Joseph Kony untuk membawa keadilan kembali di Uganda melalui kekuatan yang menurutnya diberikan langsung oleh Tuhan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di dalam kasus pemberontakan yang dilakukan oleh LRA, kelompok militan *Lord's Resistance Army* tersebut telah melakukan tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM. Dalam Konvensi Jenewa yang disepakati pada tahun 1949 dan protokol tambahan 1977, dijelaskan bahwa warga sipil, dan semua orang yang tidak ambil bagian dalam pertempuran mungkin dalam keadaan menjadi objek serangan dan harus terhindar dan terlindungi. Namun, dalam kasus yang dilakukan LRA terhadap masyarakat

Uganda dan Negara-negara lain, dapat dikatakan bahwa LRA telah melanggar konvensi jenewa tersebut. LRA telah melakukan pelanggaran HAM.

Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan LRA diantaranya adalah LRA telah melakukan kejahatan kemanusiaan berupa genosida. Selain itu LRA juga terbukti melakukan kejahatan perang dengan melibatkan penduduk sipil (non-kombatan), yaitu anak-anak dan wanita. LRA melakukan penculikan, pembunuhan, dan pembudakan seksual terhadap anak-anak dan wanita.

Dalam menanggulangi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh LRA tersebut, PBB melakukan tindakan nyata dalam mengatasi persoalan tersebut. Dewan keamanan PBB sebagai perpanjangan tangan PBB serta komisi tinggi PBB yang bernama OHCHR yang bergerak dibidang, telah melakukan beberapa tindakan konkrit dalam menanggulangi masalah tersebut.

Strategi dan mekanisme yang telah dilakukan PBB tersebut terbukti ampuh sehingga mengakibatkan kelompok militan *Lord's Resistance Army* tersebut terpukul dan melarikan diri dari Negara Uganda itu sendiri, sehingga pemulihan – pemulihan yang dilakukan oleh komisi OHCHR pun berjalan aktif di Negara tersebut. Namun *Lord's Resistance Army* itu sendiri hingga sekarang masih tetap ada bersembunyi di Negara – Negara tetangga Uganda.

Daftar Pustaka

- Adam Branch, *Displacing Human Rights; War and Intervention in Northern Uganda*, Oxford University Press Inc., New York, 2011
- Andre Le Sage, *Countering the Lord's Resistance Army in Central Africa*, Institute for National Strategic Studies SF No. 270, 2011, Archer, Clive. 2001. *International Organizations; Third Edition*. New York: Routledge.

- Conciliation Resources, *When Will This End and What Will it take? People's Perspectives on Addressing the Lord's Resistance Army Conflict*, November 2011
- Daniel S. Cheever dan H. Field Havilland Jr, 1967, *Organizing For Peace: International Organization in World Affair*, New York: Houghton Mifflin, Co.
- Lisa Harison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lexy J. Meleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mareike Schomerus, *The Lord's Resistance Army in Sudan: A History and Overview*, Institute of International Studies HSBA Working Paper 8, 2007
- International Crisis Group. 2004. *Northern Uganda: Understanding and Solving the Conflict*.
- Invisible Children dan Resolve LRA Tracker. 2011. *LRA Crisis Tracker; Annual Security Brief 2011*.
- OHCHR in the field of Africa
OHCHR annual reports tahun 2008
OHCHR annual reports tahun 2009
OHCHR annual reports tahun 2010
OHCHR annual reports tahun 2011
- The Lord's Resistance Army.
<http://www.globalsecurity.org/military/world/para/lra.htm>
- The LRA in Congo, CAR, and South Sudan.
www.enoughproject.org/conflicts/lra/congo-car-south-sudan